

**PENDUDUK TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI ANAK NEGERI TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN HAK ATAS TANAH GARAPAN (Studi Kasus Penguasaan Tanah oleh PT. Kalimanis Plywood Industries)**

**Adhie Musjahranie Swastya Putra, Dr. A. Rachmad Budiono SH., MH,  
Dr. Istislam SH, M.Hum.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang 65145. Telp (0341) 553898, FAX (0341) 566505  
Email: adhie.mkn21@gmail.com

**Abstract**

*The writing this journal discusses the legal issues relating to the occupation of Arable Land Kelompok Tani Anak Negeri State Measures Relating To Improvement Of Arable Land which is above Land Authorization PT. Kalimanis Plywood Industries. The purpose of this study, to analyze perspective and the actions of the efforts made by Kelompok Tani Anak Negeri through the responses of government officers in charge of the status of arable Land Kelompok Tani Anak Negeri are located in subdistrict Sungai Kapih district Sambutan city Samarinda in east Kalimantan province. The research methods used in this thesis is empirical legal research. The approach used is a live case study approach.*

*The Results of discussion this journal that according to government officers in charge of the land area of 40 hectares in order to clarify the status and clarity of the land, the right base by Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) when examined from the theory and the legislation in force, can not be used as proof of ownership by UUPA, especially the fact that land abandoned for years, abandoned by the right holder of the land should have fallen to the country. Attempts to do Kelompok Tani Anak Negeri Affairs is to coordinate with the officials of the City Government of Samarinda related to the land BPN Samarinda as authorities issued a decree, should immediately issue a determination of the status of abandoned land, once the land is returned to the country, then Kelompok Tani Anak Negeri can make application for registration of the land for the first time to the country with the underlying evidence during the tenure of this amplified statement related government personnel.*

**Key words:** *occupation, farmers group, government apparatus, arable land*

**Abstrak**

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pendudukan Tanah Garapan Kelompok Tani Anak Negeri Terkait Dengan Upaya Peningkatan Hak Atas Tanah Garapan yang berada diatas lahan penguasaan PT. Kalimanis Plywood Industries. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis perspektif dan tindakan dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri melalui tanggapan aparatur pemerintah yang berwenang terhadap status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri yang berada di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan

tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan live case study.

Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu menurut aparaturnya yang berwenang terhadap lahan seluas 40 hektare agar dapat diperjelas status dan kejelasan tanahnya, alas hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) bila dikaji dari teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah menurut UUPA, terlebih pada kenyataannya lahan tersebut diterlantarkan selama bertahun-tahun, ditelantarkan oleh pemegang haknya maka lahan tersebut seharusnya telah jatuh kepada Negara. Upaya yang dapat dilakukan Kelompok Tani Anak Negeri yaitu dengan berkoordinasi dengan aparaturnya Kota Samarinda terkait, terhadap lahan tersebut pihak BPN Kota Samarinda sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan ketetapan, sebaiknya segera mengeluarkan penetapan status tanah terlantar, setelah tanah tersebut kembali kepada negara, selanjutnya kelompok tani anak negeri dapat melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali kepada negara dengan di dasari bukti-bukti penguasaan lahan selama ini diperkuat dari pernyataan aparaturnya terkait.

**Kata kunci:** pendudukan, kelompok tani, aparaturnya pemerintahan, tanah garapan

### **Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>1</sup>

Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggalpun tanah masih diperlukan. Tanah juga merupakan suatu objek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, akan tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia. Karena tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting, dimana dengan tanah kita bisa makan, minum, dan memenuhi segala kebutuhan hidup yang diperoleh dari hasil pertanian yang ditekuninnya sebagai mata pencaharian.

Bagi masyarakat agraris seperti Indonesia tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, terlebih bagi para petani dipedesaan, tanah merupakan

---

<sup>1</sup>Kertasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 1.

sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya. Jadi tanah harus dipergunakan dengan tujuan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan perseorangan. Dalam Pembangunan sektor pertanian tingkat Nasional yang dilaksanakan saat ini, tidak lain dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan sektor pertanian di samping untuk mencapai dan memperbesar produksi pertanian, juga untuk meningkatkan taraf hidup para petani, karena petani merupakan saka guru pembangunan nasional. Rumusan pengertian petani dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, huruf e menjelaskan bahwa Manusia tani adalah mereka yang pokok pencahariannya adalah menguasai tanah lahan pertanian, petani ialah orang yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah, dimana mata pencarian pokoknya adalah kegiatan menguasai tanah sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>2</sup>

Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor. Keberadaan tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan, dalam hal ini kita dapat mengacu dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk kepentingan sektor tanah pertanian yang strategis dan berperan aktif bagi kemajuan perekonomian dan keberlangsungan hidup masyarakat nasional, serta tersedianya bahan pangan dan lapangan pekerjaan dalam negeri, masyarakat tetap memelihara kegiatan pertanian dan pengendalian lahan sebaik mungkin, sebagai sarana peningkatan kebutuhan pangan primer tingkat Nasional. Kegiatan pertanian di negara ini tetap berjalan walaupun negara ini sekarang telah menjadi negara industri yang maju, karena kegiatan pertanian dapat mencegah adanya kerugian sosial dan ekonomi yang berkepanjangan di masyarakat nantinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif negara kesatuan*, (Yogyakarta: Media Abadi 2005), hlm. 40.

<sup>3</sup>Jhon Salihendo, *Manusia, Tanah hak, dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 10.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juga menjelaskan mengenai penggolongan status tanah di Indonesia, terbagi dua penggolongan yakni tanah Hak dan tanah Negara. Menjelaskan lebih lanjut mengenai tanah-tanah hak dan tanah Negara, tanah garapan yang menjadi salah satu kegiatan yang ada di masyarakat Indonesia, akan sulit dijelaskan dibagian mana tanah garapan itu di jabaran dalam hukum tanah Nasional. Dalam hukum tanah nasional tidak menjelaskan lebih detail dan spesifik tanah garapan itu seperti apa, didalam Undang-undang Pokok agraria tidak mengatur tanah garapan itu sebagai dari bagian tanah hak atau bukan.<sup>4</sup>

Pada surat kepala badan pertanahan nasional perihal keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tertanggal 28 Agustus 2003 menjelaskan bahwa tanah garapan adalah suatu objek sebidang tanah yang di usahakan dan dipetik hasilnya oleh perorangan atau kelompok tanpa ada jangka waktu tertentu dan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memiliki hak atas tanah. Pada kenyataannya tanah garapan yang di maksud oleh para penggarap, aparatur negara, pemerintah, dan para ilmuwan hukum, tidak menjawab arti dan maksud dari pengertian tanah garapan yang di tetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Para penggarap dianggap sebagai penduduk ilegal yang menduduki suatu wilayah atau tanah yang mereka usahakan sebagai tanah hak milik dikarenakan mereka memiliki alat bukti fisik yang dapat digunakan dalam proses jual beli atau ganti rugi yang dianggap sama dengan sertifikat hak.<sup>5</sup>

Dari berbagai contoh pemanfaatan tanah yang berkembang di Indonesia, tidak banyak beberapa tanah yang terlihat kosong, tidak terawat yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun yang melihatkan kita tanah tersebut tidak mempunyai fungsi apapun, kecuali dengan kata lain di terlantarkan oleh pemiliknya. Berkaitan atas tanah-tanah yang tidak difungsikan, tidak dipergunakan, tidak diusahakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat, fungsi dan tujuan atas hak dari dasar penguasaannya, Pemerintah kemudian

---

<sup>4</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 272.

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 129-130.

membuat ketentuan peraturan terkait masalah tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 Januari 2010 dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia bagi pemegang hak atau penguasaan tanah diatasnya. tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan tanah dan menjadikan acuan bagi seluruh masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah yang dianggap terlantar.<sup>6</sup>

Adapun masalah yang terjadi diwilayah Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, terdapat sebuah lahan tanah yang telah digarap oleh kelompok tani anak negeri selama kurang lebih 19 tahun dari tahun 1997 hingga sekarang tahun 2016 mempunyai luas lahan 40 hektare, menghasilkan sebuah perkebunan dan pertanian yang digunakan untuk menafkahi kehidupan masyarakat diwilayah tersebut, sekarang tanah tersebut di klaim sebagai aset tanah milik PT. Kalimanis Plywood Industries. Kelompok Tani Anak Negeri memiliki bukti surat terusan dari Pemerintah kota Samarinda melalui Sekertariat Daerah Nomor: 030 546/BPK/V2/P12 menindak lanjuti surat Gasfar Pera Nomor: 01/04/2012/Smr Tanggal 1 April 2012 tentang lahan di Sungai Kapih Kecamatan Sambutan bukanlah aset Pemerintah Kota Samarinda.<sup>7</sup>

Asal muasal tanah tersebut adalah hak dari Koperasi Karyawan Kalimanis, tanah tersebut dibeli dari seorang warga yang bernama Haji Arni sebagai pembuka lahan pertama seluas 40 Hektare. Tertanggal 22 Agustus 1994 Haji Arni menerima uang muka sebesar Rp.50.000.000 untuk pembayaran tahap pertama dari Koperasi Karyawan Kalimanis. Pada tanggal 17 September 1994, oleh pihak kelurahan dibuatkan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Haji Arni untuk Koperasi Karyawan Kalimanis yang diwakilkan oleh M. Anwar Mada sebagai Ketua Koperasi Karyawan Kalimanis. Pada tanggal 23 Januari 1995 diserahkan uang sebesar Rp1.020.000.000 untuk pelunasan pembelian tanah dari pihak Koperasi Karyawan Kalimanis (Pembeli) yang diwakilkan oleh M. Anwar Mada kepada Haji Arni (Penjual) dengan Surat Pelepaskan Hak Atas Tanah (SPHT)

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Wawancara ketua Kelompok Tani Anak Negeri, 15 Mei 2013.

yang telah tercatat di kelurahan Sungai Kapih dengan Nomor 616/BH/315.NPWP.1.209.479.3.56 sebagai bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah yang beralih kepenguasaannya dari Haji Arni kepada Koperasi Karyawan Kalimanis.<sup>8</sup>

Setelah terjadi peralihan hak dari Haji Arni kepada Koperasi Karyawan Kalimanis, Koperasi Karyawan Kalimanis mengusahakan tanahnya tersebut kepada PT. Kalimanis Plywood Industries untuk dikelola sebagai pabrik industri plywood, PT Kalimanis Plywood Industries mengelolah lahan tersebut dengan memperkerjakan sekitar 100 orang penduduk asli warga Sungai Kapih.<sup>9</sup>

Pada Tahun 2000 PT. Kalimanis Plywood Industries bangkrut dan lahan seluas 40 hektare dari usaha PT Kalimanis Plywood Industries tersebut tidak diurus tidak dipergunakan lagi sebagaimana fungsi haknya oleh PT. Kalimanis Plywood Industries sebagai pihak yang mengelolah lahan tersebut.<sup>10</sup> Setelah ada pernyataan bangkrut pada tahun 2000 oleh PT Kalimanis Plywood Industries, sekitar 100 orang petani yang menamakan dirinya Kelompok Tani Anak Negeri makin ini makin giat dalam bercocok tanam diatas tanah yang mereka anggap sebagai tanah yang diterlantarkan dan tidak digunakan lagi oleh PT. Kalimanis Plywood Industries. Hingga saat ini ditahun 2016, dijelaskan oleh Kelompok Tani Anak Negeri, mereka masih terus menggarap tanah tersebut dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari kegiatan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari setelah mereka tidak berkerja di perusahaan PT. kalimanis Plywood Industries lagi.<sup>11</sup>

Konflik terjadi ketika Kelompok Tani Anak Negeri ingin meningkatkan tanah garapan nya itu nya menjadi hak milik, namun permohonan peningkatan hak atas tanah garapan tersebut tidak dapat dilakukan, karena dari PT.Kalimanis Plywood Industries mengklaim tanah tersebut masih sebagai aset dari PT. Kalimanis Plywood Industries.Dari uraian latar belakang tersebutadapun rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini yaitu :

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak X, Lurah Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, 28 Agustus 2013.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Op.cit.*, Wawancara Kelompok Tani Anak Negeri.

1. Bagaimana status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri yang berasal dari penguasaan PT. Kalimantan Plywood Industries menurut aparaturnya pemerintahan yang berwenang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk peningkatan hak atas tanah garapan di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur?

Penulisan jurnal tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau (*Sociological Legal Research*). Penelitian hukum empiris ini bertujuan agar ditemukannya solusi dari masalah yang langsung berada di lapangan dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada termasuk peraturan PerUndang-undangan.<sup>12</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal tesis ini pendekatan *Live Case Study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Penelitian Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara langsung terhadap responden terkait dalam penelitian ini. Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka lokasi penelitian oleh penulis tentukan di wilayah Kota Samarinda yaitu di Kecamatan Sambutan, Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih, Badan Pertanahan Kota Samarinda, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kan-wil Kalimantan Timur.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Kalimantan Timur, Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Kelompok Tani Anak Negeri, dan di Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih.

Data sekunder yaitu peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk menganalisis data primer. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 53.

Agraria, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulisan jurnal tesis ini yaitu teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara Observasi disertai pencatatan di lokasi penelitian. Data primer yang dimaksud berupa perilaku yang bersumber dari kebiasaan (*custom*) atau kepatutan (*equity*) yang tidak tertulis. Maka dengan permasalahan yang diteliti pengamatan secara langsung dengan mendatangi tempat terjadinya proses pendudukan tanah garapan oleh kelompok tani anak negeri di Sungai Kapih Kecamatan Sambutan. Wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab terhadap responden guna mendapatkan keterangan secara langsung. Responden terdiri dari Kepala Badan Pertanahan Kota Samarinda, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Kalimantan Timur, Camat dari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Lurah dari Kelurahan Sungai Kapih, Ketua Kelompok Tani Anak Negeri, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih, dan Ketua RT atau Ketua RW Kelurahan Sungai Kapih. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu data Sekunder adalah data utama yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan (*Bibliography Study*) dan Studi Dokumentasi (*Document Study*).

Teknik populasi dan sampling juga digunakan dalam penulisan jurnal tesis ini. Populasi dari penelitian ini yaitu Kelompok Tani Anak Negeri, tokoh dari masyarakat Kelurahan Sungai Kapih serta aparatur pejabat pemerintahan yang berwenang dan sample yang akan diteliti dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yaitu, Ketua dan Sekertaris Kelompok Tani Anak Negeri, dua orang tokoh asli wilayah Sungai Kapih, satu perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, Camat wilayah Sabutan Kota Samarinda, Lurah wilayah Sungai Kapih, Ketua RT dan Ketua RW wilayah Sungai Kapih beserta salah satu orang perwakilan dari PT. Kalimanis Plywood Industries yang bersedia untuk dimintai informasi terkait masalah yang terjadi.



Teknik analisa data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis. Metode analisis data dibedakan menjadi dua yaitu Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. Metode analisis yang akan penulis gunakan terhadap data yang dipakai dalam penulisan ini adalah Deskriptif Kualitatif. Yaitu data dikualitatifkan artinya menganalisis dan memberikan gambaran dari data-data yang diambil dari metode pengumpulan data, kemudian data-data tadi dianalisis dan diberikan gambaran sesuai dengan data hasil kajian pustaka serta data dari lapangan baik itu dari hasil observasi, wawancara, dengan maksud data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, logis dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.

### **Pembahasan**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil yang ditemukan yaitu :

#### **A. Status Tanah Garapan Kelompok Tani Anak Negeri yang Berasal Dari Penguasaan PT. Kalimanis Plywood Industries Menurut Aparatur Pemerintahan yang Berwenang.**

##### **1. Gambaran Umum / Profil**

###### **1.1. Provinsi Kalimantan Timur**

Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah daratan 198.441,17 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut 10.216,57 km<sup>2</sup> terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, provinsi terluas kedua setelah Papua ini dibagi menjadi 10 (sepuluh) kabupaten, 4 (empat) Kota, 136 kecamatan dan 1.445 desa/kelurahan.<sup>13</sup>

###### **1.2. Kota Samarinda**

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas sekitar 718 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 00°19'02" - 00°42'34" Lintang Selatan dan 117° 03'00" - 117° 18'14" Bujur

---

<sup>13</sup>Data hasil dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Bulan Januari-April tahun 2016.

Timur. Sebagian besar wilayah Kota Samarinda merupakan dataran dengan ketinggian 0 - 200 meter di atas permukaan air laut. Batas wilayah Kota Samarinda yaitu sebelah Utara, Timur, selatan dan Barat dibatasi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Populasi penduduk Kota Samarinda berdasarkan hasil pendataan P4B tahun 2004 mencapai 579.933 jiwa, dengan tingkat kepadatan, 807 jiwa / km<sup>2</sup>.<sup>14</sup>

### **1.3. Kecamatan Sambutan**

Sambutan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 28 Desember 2010. Kecamatan Sambutan memiliki jumlah penduduk 41.844 orang. Kecamatan Sambutan terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu: Sambutan, Sungai Kapih, Makroman, Pulau Atas dan Sindang Sari dengan luas wilayah 100.95 Kilometer. Kondisi Geografis Kecamatan Sambutan umumnya berbukit-bukit di Utara dan barat hingga dataran rendah bagian Timur dengan suhu udara rata-rata 33°celcius-25°celcius.<sup>15</sup>

### **1.4. Kelurahan Sungai Kapih**

Kelurahan merupakan unsur pelaksanaan teknis dalam wilayah Kecamatan Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemaasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akutanbilitas. Kelurahan Sungai Kapih memiliki jumlah penduduk 10.717 orang. Didalam bidang pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih memiliki luas wilayah 1.750 hektare dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Sambutan, sebelah timur sungai Mahakam, sebelah selatan Kelurahan Selili, sebelah barat barat Kelurahan Pulau Atas. Kondisi Geografis Kelurahan Sungai Kapih yaitu dengan ketinggian tanah dan permukaan laut 0,5 sampai dengan 4 meter dengan

---

<sup>14</sup>Data Monografi Kota Samarinda bulan Januari-April tahun 2016.

<sup>15</sup>Data Monografi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bulan Januari-April tahun 2016.

banyak curah hujan 200 milimeter per tahunnya dan topografi dataran rendah, tinggi, pantai dan suhu udara rata-rata 30°celcius.<sup>16</sup>

### **1.5. Suku Asli dan Mata Pencaharian**

Suku pertama yang tinggal di daerah ini adalah suku Bugis Wajo. Selanjutnya berbagai macam suku mulai berdatangan dan menetap di Kota Samarinda diantaranya adalah Suku banjar, Suku Paser, Suku Jawa, Suku Madura, Suku Nusa Tenggara, Suku Dayak, Etnis Tionghoa, dan lain-lain. Namun sesungguhnya masyarakat Samarinda adalah multi etnik. Sejarah Samarinda adalah sejarah kaum pendatang terutama dari Sulawesi dan Jawa serta dari Kalimantan sendiri, yaitu dari Kalimantan Selatan (Banjar) dan Kalimantan Tengah (Dayak Ngaju). Perjumpaan antar etnis juga mendorong terjadinya perkawinan campur antar etnis sehingga lahirlah generasi-generasi campuran (blasteran). Bagi kelompok masyarakat yang berdagang, bekerja umumnya fasih bertutur dan berkomunikasi dengan bahasa dan logat yang ada seperti barbahasa logat banjar. Kantor-kantor pemerintah dan swasta pun demikian, akan lebih mudah berurusan apabila bertutur dan berkomunikasi dengan bahasa Melayu logat Banjar. Mata pencaharian penduduk Kota Samarinda adalah pedagang, tambang, petani, industri, nelayan dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>17</sup>

### **1.6. Kelompok Tani Anak Negeri Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur**

Kelompok Tani Anak Negeri adalah sebuah organisasi perkumpulan kelompok tani yang terbentuk atas kesepakatan bersama terdiri dari mantan pegawai PT. Kalimanis Plywood Industries yang memiliki kepentingan bersama di dalamnya.<sup>18</sup> Kelompok Tani Anak Negeri terbentuk dari penduduk masyarakat sungai kapih Kecamatan

---

<sup>16</sup>Data Monografi Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bulan Januari-april tahun 2016.

<sup>17</sup>Pemerintah Kota Samarinda, Samarinda kota tepian, <http://www.getborneo.com/kota-samarinda/>, diakses 15 April 2016.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Gasfar Pera, selaku Ketua Kelompok Tani Anak Negeri, 16 Oktober 2013.

Sambutan yang bermusyawarah untuk mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pertanian. Sebagai sebuah organisasi, Kelompok Tani Anak Negeri yang dibentuk tahun 2001 tersebut belum mencatatkan diri dalam akte Notaris sebagai badan hukum yang berbentuk perkumpulan. Keberadaan Kelompok Tani Anak Negeri mendapat pengakuan dari warga Kelurahan Sungai Kapih dan Kecamatan Sambutan sebagai kelompok yang telah hadir di masyarakat yang kegiatan dan mata pencahariannya sejak dahulu yaitu sebagai petani dan bercocok tanam. Kelompok Tani Anak Negeri berlokasi di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan di ketuai oleh Gasfar Pera. Kelompok Tani Anak Negeri saat ini berjumlah 100 orang anggota. Permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani Anak Negeri adalah menyangkut status tanah garapan, yang menurut penuturan warga Kelurahan Sungai Kapih, tanah tersebut tidak jelas kepemilikannya sejak tahun 1997.<sup>19</sup> Adapun fungsi dan tujuan dari dibentuknya organisasi Kelompok Tani Anak Negeri yaitu berfungsi untuk menjadi wadah perkumpulan masyarakat penduduk Kelurahan Sungai Kapih dengan tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan ataupun arahan tentang tata cara bercocok tanam yang dilakukan oleh anggota Kelompok Tani Anak Negeri sehingga para Kelompok Tani Anak Negeri mendapatkan hasil yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan kelompok taninya.

## **2. Pendapat Menurut Aparatur Pemerintahan yang Berwenang Mengenai Status Tanah Garapan Kelompok Tani Anak Negeri**

### **2.1. Menurut Ketua RT Serta Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih**

Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat adalah salah satu perangkat desa selaku aparatur pemerintah setempat yang mengemban tugas mengembangkan swadaya masyarakat serta juga mengetahui kondisi dan masalah yang terjadi di wilayahnya. Subandi selaku pihak RT serta tokoh masyarakat kelurahan sungai kapih menerangkan bahwa

---

<sup>19</sup>Wawancara Bapak Gasfar Pera selaku Ketua Kelompok Tani Anak Negeri, 16 Oktober 2013.

pihak RT memang mengetahui keberadaan PT. Kalimanis Plywood Industries dan Kelompok Tani Anak Negeri di Kelurahan Sungai Kapih, akan tetapi pihak RT kelurahan sungai kapih kurang memahami permasalahan serta konflik yang terjadi diwilayahnya tersebut.

Subandi berdasarkan keteranganya menjelaskan bahwa kegiatan sehari-hari dari Kelompok Tani Anak Negeri adalah bercocok tanam dan bertani dilahan bekas proyek perusahaan PT. Kalimanis Plywood Industries.<sup>20</sup> Keberadaan Kelompok Tani Anak Negeri di lingkungan masyarakat Kelurahan Sungai Kapih ditandai dengan keikutsertaan kelompok tersebut dalam berbagai acara ataupun kegiatan yang berkaitan dengan bercocok tanam, budi daya hutan, dan kegiatan pertanian yang di selenggarakan baik oleh pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan dan dari pihak Kelurahan Sungai Kapih. Salah satu kegiatannya yaitu seperti kegiatan gotong royong warga, bercocok tanam yang baik dan benar, pemeliharaan lingkungan di Kelurahan Sungai Kapih dan saling menjaga akan kelestarian hutan serta cara baik untuk memanfaatkan ataupun memetik hasil dari hutan di wilayah Kelurahan Sungai Kapih.

Subandi kurang mengetahui penyebab dari bangkrutnya PT. Kalimanis Plywood Industries, dan terkait dengan ada tidaknya perjanjian yang dibuat antara perusahaan PT. Kalimanis Plywood Industries selaku pengelola lahan dengan pihak Koperasi Karyawan Kalimanis sebagai pemegang alas hak atas tanah berupa SPHT seperti yang dijelaskan oleh pihak kelurahan, pihak pemerintahan setempat tidak begitu paham akan hak-hak dan tanggung jawab yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Sedangkan mengenai koperasi karyawan kalimanis, keberadaan koperasi tersebut hingga saat ini memang masih vakum adanya dan susah untuk di mintain keterangan, hingga saat ini struktur kepengurusan organisasi dari koperasi tersebut tidak jelas, serta tidak terlihat sebuah

---

<sup>20</sup>Wawancara Bapak Subandi, selaku Ketua RT dan tokoh masyarakat Kelurahan Sungai Kapih, 13-14 April 2016.

kegiatan-kegiatan yang biasa koperasi lakukan sebagaimana fungsi dan guna keberadaan sebuah badan hukum berbentuk koperasi.

Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani anak sebagai mantan karyawan perusahaan PT. Kalimanis Plywood Industries yaitu dengan menguasai lahan bekas proyek PT. kalimanis plywood industries yang telah bangkrut, kegiatan bercocok tanam dan bertani yang dilakukan Kelompok Tani Anak Negeri mungkin didasari dengan melihat lahan bekas PT. Kalimanis Plywood Industries tidak di usahakan lagi dan tidak di rawat oleh pemegang hak nya serta dilakukan pembiaran begitu saja setelah perusahaan tersebut bangkrut.

Berdasarkan keterangan dari Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat dapat disimpulkan pihak pemegang alas hak atas tanah berdasarkan SPHT dan pihak pengelola lahan PT. Kalimanis Plywood Industries tidak menggunakan haknya dengan benar dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya memelihara lahan tersebut sehingga diduduki oleh pihak lain yaitu warga kelurahan sungai kapih yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Negeri.

Menurut Teori Kepemilikan konsepsi hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan penguasaan suatu bidang tanah, Kepemilikan tanah sebagai hak-hak individual yang bersifat pribadi kemudian di satukan dalam hak bangsa selanjutnya negara dimungkinkan memberikan kembali kepada individu yang ikut mempunyai hak bersama untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut. Pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan tiap-tiap warganegara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, dalam hal ini bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Untuk mengadakan perencanaan dan peruntukan dan penggunaan tanah pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria meletakkan kewajiban kepada mereka yang mempunyai suatu hak atas tanah dan pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, untuk menggunakan tanah yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-

undang Pokok Agraria yaitu berkewajiban untuk memelihara, menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah serta untuk mementingkan kepentingan kesejahteraan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan produksi di bidang pertanian. Ditekan pula dalam pasal 15 Undang-undang Pokok Agraria “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah”.

## **2.2. Menurut Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih**

Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih beranggapan tanah seluas 40 Hektare tersebut masih tetap dimiliki Koperasi Karyawan Kalimanis berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) Nomor 616/BH/315.NPWP.1.209.479.3.56 tanggal 23 Januari Tahun 1995 yang tercatat dalam arsip Kelurahan Sungai Kapih sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah tersebut.<sup>21</sup>

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Kelurahan Sungai Kapih, tahun 1995 Koperasi Karyawan Kalimanis meyerahkan pengelolaan tanah seluas 40 hektare tersebut kepada PT. Kalimanis Plywood Industries. PT. Kalimanis Plywood Industries dan memiliki karyawan kurang lebih 100 orang saat itu, yang dimana pekerja tersebut termasuk dari anggota Kelompok Tani Anak Negeri. Selanjutnya, dari keterangan Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih menjelaskan terkait Koperasi Karyawan Kalimanis yang ingin di mintai keterangan oleh penulis saat ini sedang vakum dan sulit untuk di mintai keterangan, dan akhirnya penulis pun sulit untuk mendapatkan data dan informasi dari pihak Koperasi Karyawan Kalimanis.

Terlepas dari sulitnya mendapatkan informasi dari Koperasi Karyawan Kalimanis, pihak Pemerintahan Sungai Kapih menjelaskan tetap bersikukuh dan berpendapat bahwa lahan seluas 40 hektare yang telah di garap oleh Kelompok Tani Anak Negeri masih ada pemegang

---

<sup>21</sup>Wawancara Lurah Kelurahan Sungai Kapih, selaku Kepala Desa wilayah Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, 13 April 2016.

alas haknya, yaitu Koperasi Karyawan Kalimanis dengan alas hak berdasarkan SPHT. Pemerintahan Sungai Kapih juga menjelaskan dan menerangkan bahwa terlepas dari vakumnya Koperasi Karyawan Kalimanis serta ada atau tidaknya perjanjian yang sah secara hukum mengenai perjanjian HGU atau Hak pengelolaan yang di buat atau di berikan oleh Koperasi Karyawan Kalimanis kepada PT. Kalimanis Plywod Industies sebagai pihak yang mengelola lahan saat itu, yang dimana saat ini PT. Kalimanis Plywood Industies mengklaim lahan tersebut masih aset miliknya. Tetapi, berdasarkan fakta yang ada saat ini, pihak Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih beranggapan lahan seluas 40 hektare tersebut masih ada pemegang alas haknya dan pihak Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih tidak dapat menerima surat permohonan peningkatan hak atas tanah yang di maksud oleh Kelompok Tani Anak Negeri.

Didalam Teori kepemilikan, menjelaskan beberapa konsep, yaitu dimulai dari konsep hukum kodrat bahwa tuhan telah menganugrahkan kepada manusia kemampuan untuk berfikir rasional, dimana pengetahuan berfikir rasional itu dapat dipergunakan manusia untuk memperoleh hak mempertahankan hidup. Dalam konsepsi hukum kodrat lahirlah konsepsi hak milik sebagai hak kebendaan yang dapat dipunyai semua orang, dan merupakan bagian dari hak asasi manusia secara kodrati serta di anugrahkan oleh tuhan kepada umat manusia.

Selama ini sejak tahun 1997 hingga saat ini tahun 2016, ±19 tahun lamanya Kelompok Tani Anak Negeri memanfaatkan lahan yang ditinggalkan begitu saja oleh penguasa lahannya yaitu Koperasi Karyawan Kalimanis dengan alas hak SPHT dan pengelola lahan PT. Kalimanis Plywood Industries, mengelolah lahan menjadi lahan perkebunan dan pertanian merupakan tindakan berfikir yang rasional dalam menggunakan dan memanfaatkan lahan dengan sesuai fungsi dan keberadaan tanah, kegiatan ini dilakukan guna memperoleh hasil lahan perkebunan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan



guna mempertahankan hidup setelah tidak bekerja lagi diperusahaan PT. Kalimanis Plywood Industries.

Fakta yang didapat di sesuaikan dengan Teori Kepemilikan bahwa anggota-anggota Kelompok Tani Anak Negeri adalah warga sungai kapih dan mantan karyawan dari PT. Kalimanis Plywood Industries. Sejak berdirinya hingga bangkrutnya PT. Kalimanis Plywood Industries para perkerja yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Anak Negeri tanpa disadari telah memelihara dan menjaga lahan tempat mereka bekerja tersebut, serta memanfaatkan lahan tersebut sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terlebih setelah bangkrutnya perusahaan, masyarakat sungai kapih yang tergabung kelompok tani anak negeri ini makin giat mengusahakan lahan yang di tinggalkan begitu saja oleh PT. Kalimanis Plywood Industries selaku pengelola lahan dan oleh pemegang hak yang diterangkan pihak Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SHPT) yaitu koperasi karyawan kalimanis.

### **2.3. Menurut Kecamatan Sambutan**

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Kecamatan Sambutan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Samarinda. Kecamatan Sambutan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 28 Desember 2010.

Menurut yang di ketahui oleh baharuddin pada saat itu tahun 2012 Kelompok Tani Anak Negeri menerangkan kepada kecamatan bahwa Kelompok Tani Anak Negeri ingin meningkatkan status tanah garapan yang telah mereka garap selama kurang lebih 16 tahun yang berada di Kelurahan Sungai Kapih menjadi hak milik.<sup>22</sup> Kelompok Tani Anak Negeri yang diwakili oleh gasfar pera menerangkan kepada pemerintah

---

<sup>22</sup>Wawancara Bapak Baharuddin, selaku Camat Kecamatan Sambutan, 12 April 2016.

Kecamatan Sambutan bahwa Kelompok Tani Anak Negeri telah menyurati Pemerintah Kota Samarinda dengan nomor surat : 01/04/12/Smr tanggal 1 April 2012 tentang lahan garapan Kelompok Tani Anak Negeri di wilayah Kelurahan Sungai Kapih dengan balasan surat dari Sekertariat Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor surat : 030 546/BPK/V2/P12 tanggal 7 Juni 2012 yang menyampaikan beberapa hal yaitu dengan hasil bahwa lahan garapan tersebut bukan merupakan aset pemerintah Kota Samarinda.

Pihak Pemerintahan Kecamatan Sambutan menanggapi surat yang diterangkan oleh gasfar pera tersebut dengan menganjurkan kepada Kelompok Tani Anak Negeri untuk memproses tanah lahan garapan tersebut sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu diawali dari melakukan surat permohonan dan pengajuan peningkatan status tanah yang diawali dari kelurahan sungai kapih diteruskan kepada kecamatan hingga sampai ke Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan melampirkan bukti-bukti dan keterangan yang benar terhadap lahan garapan tersebut.

#### **2.4. Menurut Badan Pertanahan Kota Samarinda**

Terhadap efektifitas Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) Koperasi Karyawan Kalimanis yang tercatat dan diterangkan oleh Kelurahan Sungai Kapih, berdasarkan hasil wawancara dengan Endang, selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah dan bagian Sengketa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, mengatakan; “SPHT yang merupakan produk dari Kelurahan yang dapat digunakan sebagai alat bukti penguasaan terhadap sebidang tanah tertentu yang diterbitkan setelah terjadinya proses jual-beli. Maka sangatlah dianjurkan sekali bagi koperasi karyawan kalimanis untuk segera mendaftarkan tanah tersebut di BPN Kota Samarinda yang nantinya tanah tersebut akan bersertifikat hak milik Koperasi Karyawan Kalimanis”.<sup>23</sup>

Karena sejatinya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) belum dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang kuat, tetap dan terpenuhi

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ibu Endang, selaku kasubsi pengaturan tanah dan Sengketa di Badan Pertanahan Kota Samarinda, 21 April 2016.

sebagaimana kekuatan hukum sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dijelaskan oleh pihak BPN kota Samarinda SPHT Nomor : 616/BH/315.NPWP.1.209.4793.56, tanggal 23 Januari 1995 tersebut hanya merupakan alat bukti pelepasan hak atas tanah dari 59 orang pembuka lahan pertama kepada Koperasi Karyawan Kalimanis.

Mengenai klaim lahan tersebut sebagai aset PT. Kalimanis Plywood Industries, sebaiknya PT. Kalimanis Plywood Industries dapat menerangkan dan menjelaskan surat, maupun bukti-bukti hak apa yang dia miliki untuk menjelaskan bahwa lahan tersebut adalah benar merupakan aset dari PT. Kalimanis Plywood Industries yang jelas-jelas perusahaan tersebut telah bangkrut pada tahun 2000 yang dimana aset-asetnya pastinya telah di bekukan oleh negara.

Selanjutnya Endang selaku Kasubsi Pengaturan Tanah dan Sengketa di Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda, menyatakan bahwa sudah tepat langkah yang dilakukan Kelompok Tani Anak Negeri selaku penggarap lahan di kelurahan sungai kapih menyurati pemerintah Kota Samarinda untuk mengetahui kejelasan lahan tanah yang telah mereka garap selama ini, setelah itu bagi Kelompok Tani Anak Negeri hendaknya agar berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk diproses lahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun mengenai adanya konflik lahan yang terjadi di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan oleh Kelompok Tani Anak Negeri dan PT. Kalimanis Plywood Industries tersebut, tidak tercantum dalam catatan sengketa di kantor BPN Kota Samarinda yang melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda. Tetapi, Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda hanya sebatas mengetahui prihal dinyatakan bangkrutnya PT. Kalimanis Plywood Industries pada tahun 2000.

## **2.5. Menurut Direktorat Jendral Kekayaan Negara**

Hasil wawancara dengan Dolfin bagian kasi PKN di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Timur, menyatakan bahwa Surat dari Sekertariat Daerah Pemrtintah Kota

Samarinda, Nomor: 030 546/BPK/V2/P12, yang menindaklanjuti surat Gasfar Pera, Nomor: 01/04/2012/Smr, tertanggal 1 April 2012, tentang lahan di Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.

Pihak Pemerintah Kota Samarinda hanya berasumsi terkait lahan tersebut adalah aset dari PT. Kalimanis Plywood Industries yang telah bangkrut dan asetnya tersebut dibekukan oleh pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada Tahun 2000. Namun, pada kenyataannya tahun 2004 BPPN dibubarkan dan wewenangnya di serahkan kepada DJKN. Terhadap hal inilah, Pemerintah Kota Samarinda kemudian berasumsi dan menyatakan lahan tersebut bukan aset dari Pemerintah Kota Samarinda, melainkan aset dari lahan eks BPPN yang telah dibubarkan tahun 2004, yang wewenangnya telah diserahkan kepada DJKN, sehingga yang tertulis di cop surat balasan oleh Pemerintah Kota Samarinda, kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan perihal menindak lanjuti Gasfar Pera, tentang lahan eks BPPN, dengan menyatakan bahwa lahan tersebut bukanlah aset dari Pemerintah Kota Samarinda.<sup>24</sup>

Jika di Analisis dari Teori Kepemilikan, menurut Teori kepemilikan dalam hukum Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yang merupakan konkordan dari Burgerlijk Wetboek Belanda. Konsepsi Hak atas tanah dalam Undang-undang Pokok Agraria berbeda dengan konsepsi mengenai hak kebendaan atas tanah yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, jika tanah tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan, maka tanah tersebut adalah milik dari negara. Sedangkan dalam konsep Undang-undang Pokok Agraria, tanah di wilayah Indonesia bukanlah milik Negara Republik Indonesia, melainkan adalah milik seluruh bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (2) UUPA) dan pada tingkatan yang paling tinggi dikuasi oleh Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA).

Relevansinya sebagai pisau analisis dalam penulisan ini ialah Teori Kepemilikan sangat erat kaitannya dengan penguasaan suatu bidang

---

<sup>24</sup>Wawancara Bapak Dolfi, bagian pemerintahan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kota Samarinda, 19 April 2016.

tanah. Kepemilikan tanah sebagai hak-hak individual yang bersifat pribadi kemudian telah disatukan dalam hak bangsa selanjutnya Negara dimungkinkan memberikan kembali kepada individu yang ikut mempunyai hak bersama guna menguasai dan mempergunakan hak tersebut. Kemudian hak tersebut menunjukkan kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi dirinya dan keluarganya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria penggunaan tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan dalam usaha pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan kebahagiaan yang mempunyainya, maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Untuk mengadakan perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah pada Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria meletakkan kewajiban kepada mereka yang mempunyai tanah, yaitu setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, untuk menggunakan tanah yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria yaitu berkewajiban untuk memelihara, menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah serta mementingkan keperluan kesejahteraan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan produksi di bidang pertanian. Di tekankan dalam Pasal 15 Undang-undang Pokok Agraria “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Selanjutnya, larangan pemilikan dan pengusahaan tanah yang berlebihan dalam (Pasal 7 dan 17 UUPA), serta kebijakan dan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-undang Pokok Agraria, merupakan penjabaran sifat fungsi sosial yang menunjukkan adanya unsur kebersamaan.

Dengan demikian, filosofis pemberian hak atas tanah kepada seseorang ataupun badan hukum didasarkan pada diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau usaha yang nyata, serta adanya kewajiban untuk menggunakan hak tersebut. Ini berarti, jelas dalam hal ini tanah tidak bisa dijadikan obyek investasi

semata-mata saja tanpa dimanfaatkan sesuai fungsi pemberian haknya dan terlebih tidak dipelihara oleh pemegang haknya, tanah tidak dapat terus menurun hanya dijadikan obyek spekulasi oleh pemegang haknya dengan diterlantarkan begitu saja lalu diakusisi tanah tersebut sewaktu-waktu bila dibutuhkan dan atau bilamana tanah tersebut di klaim oleh pihak lain yang merawat, menjaga fisik dan mengusakan tanah tersebut sesuai fungsi dan kegunaan keberadaan tanah.

Lahan Koperasi Karyawan Kalimanis tersebut adalah tanah hak berdasarkan alas penguasaan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) Nomor : 616/BH/315.NPWP.1.209.4793.56, tertanggal 23 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih yang letak wilayahnya berada di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan luas lahan 40 hektare. Pada faktanya pihak penguasa lahan yakni Koperasi Karyawan Kalimanis menerlantarkan, membiarkan begitu saja, serta tidak mengusakan lahan tersebut selama bertahun-tahun. Tidak dimanfaatkan atau tidak dipergunakan, akhirnya tanah ini kemudian diusahakan dan digarap oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Negeri sejak tahun 1997 yang menghasilkan lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Selanjutnya, menurut Maria S. Sumarjono, bahwa apabila dalam jangka waktu tanah hak oleh pemegang haknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuannya, maka tanah tersebut akan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, yang akan menjadi dasar hapusnya hak atas tanah tersebut untuk kemudian ditetapkan kembali sebagai tanah Negara.<sup>25</sup>

Terlebih mengenai efektifitas SPHT yang dimiliki Koperasi Karyawan Kalimanis, SPHT bukanlah alas hak seperti yang dimaksud dalam UUPA yang dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan suatu bidang tanah yang sah menurut UUPA, melainkan SPHT hanya produk terbitan Kelurahan Sungai Kapih terkait alat bukti surat pelepasan hak atas tanah dari 59 orang pembuka lahan pertama kepada Koperasi Karyawan Kalimanis setelah terjadinya proses jual-beli antara kedua belah pihak tersebut. Dalam proses pendaftaran tanah, sertifikat adalah proses terakhir, sedangkan SPHT adalah alat bukti penguasaan hak atas tanah yang akan digunakan untuk mengurus pendaftaran tanah agar terbit

---

<sup>25</sup>Maria S. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Politik Dan Budaya*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 16.

sertipikat tanah yang sah yang dikeluarkan oleh BPN. Dengan demikian, penguasaan tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) oleh Koperasi Karyawan Kalimanis belum cukup kuat untuk dijadikan bukti kepemilikan atas tanah hak seluas 40 hektare tersebut. Selanjutnya, penguasaan tanah hak oleh Koperasi Karyawan Kalimanis berdasarkan SPHT dan PT. Kalimanis Plywood Industries sebagai pengelola tersebut tidak memanfaatkan lahan sebaik-baiknya dan tidak digunakan sesuai fungsi keberadaan penguasaan tanah tersebut.

Koperasi Karyawan Kalimanis dan PT. Kalimanis Plywood Industries yang dengan sengaja membiarkan tanah tersebut terlantar dan tidak dimanfaatkan sesuai fungsi penguasaan atas tanah tersebut menimbulkan pihak lain yaitu Kelompok Tani Anak Negeri yang akhirnya merawat, menjaga dan mengusakan tanah tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Sehingga lahan tersebut wajibnya dapat diproses kejelasan status tanahnya oleh aparat pemerintah terkait setelah tidak dimanfaatkan lagi oleh penguasa lahannya, dan apabila memang benar diterlantarkan oleh pemegang hak atau penguasa lahan tersebut, maka harapkan aparat pemerintah terkait yang berwenang dalam hal ini Kepala BPN Kota Samarinda dapat mengeluarkan ketetapan mengenai status lahan yang telah digarap Kelompok Tani Anak Negeri, yaitu sebagai objek penetapan tanah terlantar oleh penguasa lahan sebelumnya yaitu Koperasi Karyawan Kalimanis dan PT. Kalimanis Plywood Industries, sehingga selanjutnya oleh Kelompok Tani Anak Negeri yang merawat dan mengusahakan lahan tersebut selama bertahun-tahun dapat melakukan proses permohonan pendaftaran tanah kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya ditindaklanjuti oleh aparat pemerintahan terkait dengan menyampaikan bukti bahwa tanah tersebut telah menjadi objek penetapan tanah terlantar oleh pemegang hak sebelumnya. Bagi Kelompok Tani Anak Negeri hendaknya dapat menyampaikan landasan bukti-bukti mengenai penguasaan fisik lahan selama bertahun-tahun, dengan didukung bukti dari keterangan masyarakat serta aparat Pemerintahan terkait kebenaran lahan tersebut selama ini  $\pm 19$  tahun telah dirawat oleh kelompok Tani Anak Negeri dan telah diusahakan sesuai fungsi keberadaan tanah yang menghasilkan lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga

nantinya dapat diterbitkan sertifikat hak milik yang sah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum atas status tanah tersebut oleh pemerintah terhadap lahan garapan tersebut.

**B. Upaya yang Dilakukan Oleh Kelompok Tani Anak Negeri Untuk Peningkatan Hak Atas Tanah Garapan Di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur**

Upaya yang telah dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk peningkatan hak atas tanah garapan di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan menyampaikan surat penjelasan kepada Pemerintah Kota Samarinda/Walikota Samarinda, atas nama Gasfar Pera, dengan nomor surat: 01/04/12/Smr, tanggal 1 April 2012.

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda lalu menanggapi perihal surat tersebut dan berkordinasi dengan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda tanggal 7 Juni 2012 menerbitkan surat dengan nomor: Nomor: 030 546/BPK/V2/P12, sebagai balasan dari surat saudara Gasfar Pera. Pemerintah Kota Samarinda Melalui Sekretariat Daerah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lahan tersebut bukan merupakan aset Pemerintah Kota Samarinda tetapi berdasarkan data-data yang disampaikan adalah lahan eks BPPN;
2. Bahwa surat yang disampaikan Kelompok Tani Anak Negeri, atas nama Gasfar Pera, akan dilanjutkan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Kepada Gasfar Pera, dianjurkan untuk melakukan koordinasi dengan DJKN.

Surat Tembusan ini digunakan untuk menindak lanjutin proses permohonan pemrosesan lahan yang telah di garap kelompok tani anak negeri selama ini, guna mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Demikian di sampaikan surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda agar pihak-pihak terkait, yaitu : Walikota Samarinda, Wakil



Walikota Samarinda, DPRD Kota Samarinda, Gasfar Pera, Camat Sambutan, dan Lurah Sungai Kapih hendaknya dapat berkoordinasi dan memeriksa kebenaran bukti-bukti yang ada mengenai lahan yang berada di Kelurahan Sungai Kapih dan ikut serta dalam proses kejelasan dan menjamin kepastian hukum terhadap status lahan yang telah di garap Kelompok Tani Anak Negeri di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Selanjutnya dari Objek tanah hak yang dikuasai oleh Koperasi Karyawan Kalimanis berdasarkan SPHT dan pengelolaan lahan PT. Kalimanis Plywood Industries telah ditinggalkan begitu saja. Sehingga seharusnya terhadap lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai objek penertiban tanah terlantar sesuai dengan prosedur penetapan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Setelah itu, pihak Kelompok Tani Anak Negeri yang telah merawat lahan tersebut selama ini, untuk dapat melakukan permohonan pendaftaran tanah kepada Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterbitkannya sertifikat hak milik yang dapat digunakan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan tersebut.

Permohonan dan laporan yang telah disampaikan oleh Kelompok Tani Anak Negeri, hendaknya dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan mengeluarkan surat penetapan, dalam hal penetapan status tanah yang dikuasai oleh Koperasi Karyawan Kalimanis berdasarkan SPHT dan lahan bekas pengelolaan oleh PT. Kalimanis Plywood Industries, sebagai objek tanah terlantar dan kemudian dapat menerima serta menyerahkan kuasa hak atas tanah kepada Kelompok Tani Anak yang telah menggarap dan mengusahakan lahan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan fungsi keberadaan sebuah tanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) saat ini lahan tersebut telah menghasilkan lahan perkebunan dan pertanian yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi keluarga-keluarga dari Kelompok Tani Anak Negeri yang berada di Kelurahan Sungai Kapih.

Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di simpulkan terdapat tanah terlantar, terhadap BPN Kota Samarinda dalam hal ini pihak yang berwenang dapat menyampaikan peringatan-peringatan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010). Apabila, peringatan-peringatan tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar. Kepala menetapkan tanah terlantar yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan ketetapan tersebut, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pada pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan, bahwa dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak, maka penetapan tanah terlantar memuat hapusnya hak atas tanah sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Setelah mendapat penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar terkait lahan garapan yang sudah digarap oleh Kelompok Tani Anak Negeri selama ±19 tahun dapat dijadikan objek penertiban tanah terlantar. Dengan demikian, Kelompok Tani Anak Negeri dapat mengajukan permohonan peningkatan hak atas lahan garapannya tersebut kepada Negara untuk menjadi hak milik dengan melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah secara fisik disertai pengakuan dari masyarakat serta aparatur pemerintahan terkait yang menjadi bukti kuat terhadap penguasaan lahan tersebut. Selanjutnya, kepada pihak-pihak aparatur pemerintahan terkait ikut serta dalam memberi

keterangan bahwa lahan ex Koperasi Karyawan Kalimanis sebagai pemegang hak atas tanah dan pihak pengelola lahan yaitu PT. Kalimanis Plywood Industries, telah menjadi objek penetapan tanah terlantar oleh pihak yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda berdasarkan ketetapan yang dikeluarkannya. Lalu, terhadap Kelompok Tani Anak Negeri selanjutnya dapat melakukan permohonan pendaftaran tanah kepada Negara sesuai peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Menurut Teori Kontinuitas (*Continuity*) dimana artinya suatu tindakan didasari dengan melakukan okupasi disuatu wilayah tertentu sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan wilayah terkait. Teori Kontinuitas didasari dari konsep okupasi yang diartikan sebagai pendudukan, penggunaan, atau penempatan tanah kosong, dan yang kedua yaitu pendudukan dan penguasaan suatu wilayah. Jadi, terhadap pengertian mengenai okupasi yang kita tangkap yaitu suatu bidang tanah yang di duduki dan di pergunakan oleh seseorang yang melakukan pendudukan dan penggunaan atas tanah disebuah wilayah, pembahasan okupasi dalam Teori Kontinuitas ini terlihat lebih kepada penguasaan secara fisik atau faktual sebuah wilayah tanpa diikuti sebuah hak yang sah secara hukum diatasnya.

Suatu tindakan okupasi lebih sering mencakup tindakan penggunaan lahan tanpa mengetahui asal usul dari tanah tersebut. Hal ini tampak dari yang dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri yang mengusahakan lahan tanah dari penguasaan Koperasi Karyawan Kalimanis sebagai pemegang hak atas tanah dan pihak pengelolaan lahan yaitu PT. Kalimanis Plywood Industries yang telah bangkrut. Bahwa suatu tindakan yang dilakukan hanya didasari sifat menemukan semata-mata untuk memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan dari suatu wilayah tertentu melalui proses okupasi.

Okupasi didalam Undang-undang Pokok Agraria tidak dikenal dan tidak dijelaskan, dari uraian yang kita dapat simpulkan bahwa hak atas tanah yang berstatus tanah okupasi tidak dapat dijadikan bukti atas kepemilikan suatu tanah, status tanah dengan okupasi diartikan dengan jelas hanya

dikuasi, mungkin secara fisik tetapi tidak didasari atas alas hukum suatu hak. bukti alas hukum yang kuat atas kepemilikan suatu tanah biasanya berupa sertifikat hak atas tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pengertian menguasai atau dikuasi atas milik atau kepunyaan seseorang dalam pengertian hukumnya mempunyai makna berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda.<sup>26</sup>

Okupasi yang kita pahami ialah merupakan penguasaan atau pendudukan tanah secara ilegal oleh masyarakat sekitar untuk memakai atau menggarap tanah tanpa izin pemegang hak atau kuasanya. Terdapat beberapa teori dalam okupasi, yang paling dianggap memiliki arti penting dalam penulisan tesis ini terhadap klaim dan hak-hak atas tanah yang digarap oleh Kelompok Tani Anak Negeri adalah Teori Kontinuitas (*Continuity*), menurut teori ini dimana suatu tindakan okupasi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri di wilayah Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda digunakan dan diperlukan untuk menjamin keamanan dan pengembangan dari wilayah tersebut. Terlebih lahan di kelurahan sungai kapih yang dengan luas 40 hektare itu tidak dimanfaatkan sesuai pemberian hak oleh pemegang haknya dan di biarkan begitu saja hingga menurut masyarakat sekitar bahwa lahan tersebut diterlantarkan. Teori ini sampai tingkat tertentu dapat digunakan dalam klaim-klaim yang ingin diajukan oleh pihak-pihak yang melakukan okupasi. Contohnya pada penduduk warga Sungai Kapih yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Negeri yang ingin melakukan permohonan peningkatan hak atas tanah garapan yang mereka telah garap selama  $\pm 19$  tahun berdasarkan suatu kaidah kebiasaan.

Faktor-faktor yang mendukung sering terjadinya okupasi di Indonesia adalah lahan pertanian atau lahan usaha masyarakat yang makin menyempit/ menipis, ditambah perkembangan kependudukan di Indonesia yang cepat, dimana jumlah penduduk bertambah tetapi lahan atau wilayah untuk berusaha dimasyarkat tidak bertambah bahkan berkurang. Selanjutnya, masyarakat berupaya dan berusaha atas inisitifnya sendiri

---

<sup>26</sup>Sustiyadi, *Beberapa Bahan Pemikiran Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Tanah Negara*, (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1997), hlm. 15-17.

mencari lahan untuk berusaha diatas tanah-tanah yang mereka anggap terlantar dan dibiarkan tidak di urus oleh pemegang haknya, baik diatas tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Masalah yang diakibatkan atas tanah yang ditelantarkan oleh pemegang haknya lebih banyak merugikan negara dan pemerintah, karna tanah sejatinya memiliki fungsi sosial dapat di manfaatkan oleh banyak orang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada tesis ini, disimpulkan bahwa:

1. Pendapat dan tindakan aparaturnya pemerintah yang berwenang mengenai status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri menurut ketua RT, Pemerintahan Kelurahan Sungai Kapih, Pemerintahan Kecamatan Sambutan dan Badan Pertanahan Kota Samarinda bahwa tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri masih merupakan milik Koperasi Karyawan Kalimanis sebagai pemilik lahan melalui bukti berupa (SPHT) Nomor 616/BH/315/.NPWP. 1.209.479.3.56 tertanggal 23 Januari tahun 1995 yang terbitkan oleh Kelurahan Sungai Kapih, namun kekuatan pembuktian kepemilikan berdasarkan SPHT yang dikeluarkan kelurahan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna seperti yang diatur didalam UUPA. Selanjutnya, dalam peraturan Perundang-undangan dan teori kepemilikan bahwa Kelompok Tani Anak Negeri tidak salah dalam memanfaatkan dan menggunakan lahan yang dianggap terlantar, hal ini didasari oleh Kelompok Tani Anak Negeri memiliki hak-hak yang dapat disatukan dalam hak bangsa dan negara, sebagaimana dimaksud ikut memanfaatkan atau mempergunakan haknya sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat guna memenuhi kebutuhan mendasar suatu bangsa.
2. Upaya yang telah dilakukan Kelompok Tani Anak Negeri yaitu dengan menyampaikan surat penjelasan kepada Pemerintah Kota Samarinda, atas nama Gasfar Pera, dengan nomor surat: 01/04/12/Smr, tanggal 1 April 2012 dengan tujuan untuk meminta jajaran Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam hal ini Kelurahan Sungai Kapih dan kecamatan Sambutan untuk menerima

permohonan peningkatan hak atas tanah garapan yang telah digarap oleh Kelompok Tani Anak Negeri selama ini. Selanjutnya, Kelompok Tani Anak Negeri yang melakukan upaya pendudukan sesuai teori kontinuitas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menempuh upaya dengan mengusulkan tanah tersebut untuk diidentifikasi sebagai objek penetapan tanah terlantar dan dilakukan permohonan peningkatan hak atas tanah kepada negara setelah terbitnya hasil identifikasi dari Badan Pertanahan Nasional, disertai dengan keterangan dari pemerintahan terkait, agar dapat menjadi bukti yang kuat terhadap kejelasan kepemilikan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hatta, Mohammad. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2005.
- Kertasapoetra. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Salihendo, Jhon. *Manusia, Tanah hak, dan Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Sumardjono, Maria S. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Politik Dan Budaya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Sustiyadi. *Beberapa Bahan Pemikiran Penyusunan Rencana Peraturan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Tanah Negara*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1997.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang *Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*.

**Naskah Internet**

Pemerintah Kota Samarinda. Samarinda Kota Tepian.  
<http://www.getborneo.com/kota-samarinda/>. Diakses 15 April 2016.